

## Pengaruh Efektivitas PAD, Ketergantungan Keuangan Daerah, dan Efisiensi Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Provinsi Se-Sumatera

**Riski Ayuni**

Politeknik Negeri Sriwijaya

**Kartika Rachma Sari**

Politeknik Negeri Sriwijaya

**Eka Jumarni Fithri**

Politeknik Negeri Sriwijaya

Korespondensi Penulis: [ekajf.2f@gmail.com](mailto:ekajf.2f@gmail.com)

Alamat: Jalan Srijaya Negara, Palembang 30139

**Abstract.** *One way to achieve a goal in regional autonomy, especially in terms of improving welfare and community services, is through capital expenditure. This study aims to determine the effect of Financial Performance on the Capital Expenditure Allocation of Provincial Governments in Sumatra for 2017-2021. The population in this study is 10 Provincial Governments with a total observation data (sample) of 50 Provincial Government APBD Realization Reports throughout Sumatra. Testing this hypothesis using multiple linear regression with the help of Eviews 12 software. The results of this study show that partially the Effectiveness of PAD and Regional Financial Efficiency have a significant negative effect on Capital Expenditure Allocation. Meanwhile, Regional Financial Dependence does not have a significant effect on Capital Expenditure Allocation.*

**Keywords:** *The effectiveness of PAD; Regional Financial Dependence; Regional Financial Efficiency; Capital Expenditure Allocation*

**Abstrak.** Salah satu cara untuk mencapai suatu tujuan dalam otonomi daerah, terutama dalam hal meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat yaitu dengan melalui belanja modal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Se-Sumatera Tahun 2017-2021. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 10 Pemerintah Provinsi dengan total data observasi yaitu sebanyak 50 Laporan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Se-Sumatera. Pengujian hipotesis ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan *software Eviews 12*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Efektivitas PAD dan Efisiensi Keuangan Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Sementara Ketergantungan Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.

**Kata kunci:** Efektivitas PAD; Ketergantungan Keuangan Daerah; Efisiensi Keuangan Daerah; Alokasi Belanja Modal

### LATAR BELAKANG

Pemerintah mulai memberlakukan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Kemudian, ditetapkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 untuk menggantikan undang-undang sebelumnya yang diubah menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 terkait otonomi daerah. Otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah “hak, wewenang, dan kewajiban bagi daerah otonom untuk

*Received Juli 30, 2023; Revised Agustus 22, 2023; Accepted September 15, 2023*

\* Eka Jumarni Fithri, [ekajf.2f@gmail.com](mailto:ekajf.2f@gmail.com)

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia”.

Untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan yang besar dalam rangka pelaksanaan otonomi daerahnya. Kemandirian keuangan yang besar artinya daerah tersebut tidak lagi memiliki ketergantungan pada bantuan dari baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dapat diukur dengan cara menganalisis kinerja keuangan daerah.

Salah satu cara untuk menggapai tujuan dalam otonomi daerah, khususnya dalam hal peningkatan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat yaitu dengan melalui belanja modal (Devi et al., 2022). Hal ini sebagai upaya bagi masyarakat umum agar memperoleh manfaat yang akhirnya akan diberikan melalui belanja modal. Belanja modal disalurkan kepada masyarakat berdasarkan pada kebutuhan prasarana dan sarana di daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan juga untuk memelihara fasilitas umum.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan APBD bahwa “kebijakan alokasi belanja modal harus memenuhi sekurang-kurangnya 40% dari total belanja daerah”. Pada kenyataannya, Pemerintah Provinsi Se-Sumatera tidak mengalokasikan anggarannya sebesar 40% untuk belanja modal. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel 1 dibawah ini:

**Tabel 1. Belanja Daerah Pemprov se-Sumatera Tahun Anggaran 2021**

<b>Nama Provinsi</b>	<b>Belanja Modal (dalam triliun rupiah)</b>	<b>Total Belanja Daerah (dalam triliun rupiah)</b>	<b>Alokasi Belanja Modal (%)</b>
Aceh	3,31	13,52	24,48%
Sumut	1,31	13,95	9,29%
Sumbar	0,83	6,89	12,04%
Riau	1,24	7,74	16,02%
Jambi	0,48	3,99	12,03%
Sumsel	2,19	11,41	19,19%
Bengkulu	0,42	3,05	13,77%
Lampung	0,92	6,30	14,60%
Bangka Belitung	0,57	2,46	23,17%
Kepulauan Riau	0,37	3,91	9,46%

*Sumber: Data diolah, 2023*

Berdasarkan data belanja daerah Pemerintah Provinsi se-Sumatera Tahun 2021, menunjukkan alokasi belanja modal dari seluruh total belanja daerah untuk setiap pemerintah daerah tergolong masih rendah. Rata-rata rasio alokasi belanja modal Pemerintah Provinsi Se-Sumatera yaitu sebesar 15,41%. Hal itu berarti Pemerintah Provinsi Se-Sumatera belum sepenuhnya mampu untuk mengalokasikan anggarannya pada pos belanja modal sebesar 40%. Alokasi belanja modal pada Pemerintah Provinsi masih lebih kecil diantaranya adalah provinsi Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Riau dan Sumatera Selatan dengan alokasi belanja modal pada tiap pemerintah masing-masing sebesar 9,29%, 9,46%, 12,03%, 12,04%, 13,77%, 14,60%, 16,02%, 19,19%. Rendahnya alokasi terhadap belanja modal dan adanya penurunan terhadap alokasi belanja modal tersebut, menunjukkan kurangnya perhatian dari pemerintah pada belanja yang dapat digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Novita & Nurhasanah (2020:74) dengan faktor-faktor yang diamati diantaranya ketergantungan daerah, efektivitas, dan efisiensi yang secara parsial memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap belanja modal. Penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian (Devi et al., 2022:984) yang menunjukkan bahwa efisiensi keuangan daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal, tetapi variabel efektivitas PAD dan ketergantungan keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Kinerja keuangan berupa ketergantungan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal (Marlina et al., 2017:27). Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Martini & Dwirandra, 2015:426) bahwa ketergantungan daerah berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Pengaruh Efektivitas PAD, Ketergantungan Keuangan Daerah, dan Efisiensi Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Provinsi Se-Sumatera”.

## KAJIAN TEORITIS

### Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan adalah teori yang menggambarkan adanya kemungkinan konflik dalam hubungan antara agen dan *principal* (Maria & Halim, 2021). Teori ini membahas tentang hubungan yang terjalin berdasarkan kontrak perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih dimana pihak pertama adalah prinsipal dan pihak lainnya adalah agen. Pihak yang bertindak sebagai pemberi perintah dan bertugas untuk mengawasi, memberikan penilaian serta masukan atas tugas yang telah dijalankan oleh agen disebut dengan Prinsipal. Sedangkan pihak yang menerima dan menjalankan tugas sesuai dengan kehendak dan keinginan prinsipal disebut dengan agen.

Hubungan keagenan pada sektor pemerintahan dapat dilihat dalam kinerja keuangan terlebih lagi dalam hal penyusunan anggarannya. Penyusunan anggaran pemerintah daerah harus disetujui oleh pemerintah pusat sebagai prinsipal, dimana setiap kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah daerah dilakukan berdasarkan anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat.

### Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010), “belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja operasional”. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya yang ada di pemerintah daerah. Alokasi belanja modal adalah pengeluaran dalam hal perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dibandingkan dengan total belanja dalam APBD (Suwandi & Tahar, 2015). Alokasi ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total belanja}} \times 100\%$$

Persentase belanja modal menurut (Nurhidayati & Yaya, 2013:108) adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. Persentase Belanja Modal**

Persentase (%)	Kategori
0% - 10%	Sangat Rendah
10% - 20%	Sedang
20% - 30%	Tinggi
30% - 40%	Sangat Tinggi

Sumber: (Nurhidayati & Yaya, 2013:108)

### Efektivitas PAD

Pengukuran tingkat efektivitas PAD dilakukan untuk mengetahui tentang berhasil tidaknya pemerintah daerah dalam mencapai tujuan anggaran yang memerlukan data-data realisasi pendapatan dan target pendapatan. Rasio efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan berdasarkan potensi riil (Mahmudi, 2016). Semakin tinggi rasio efektivitas maka daerah telah efektif menggunakan PAD. Rasio efektivitas PAD dalam penelitian ini diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus di atas dapat dinyatakan bahwa semakin besar realisasi penerimaan APBD terhadap target penerimaan PAD maka rasio efektivitas keuangan daerah akan semakin besar atau sebaliknya. Semakin tinggi rasio efektivitas maka daerah telah efektif menggunakan PAD secara efektif dalam membiayai semua kegiatan atau program dalam rangka melaksanakan pembangunan dan mensejahterakan masyarakatnya. Kriteria untuk menetapkan efektivitas PAD dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3. Kriteria Efektivitas PAD**

Persentase Efektivitas (%)	Efektivitas PAD
> 100	Sangat Efektif
100	Efektif
90-99	Cukup Efektif
75-89	Kurang Efektif
< 75	Tidak Efektif

Sumber: (Mahmudi, 2016:141)

### Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan total pendapatan transfer yang diterima oleh pemerintah daerah dengan total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2016:140).

$$\text{Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Berikut ini kriteria ketergantungan keuangan daerah menurut Badan Litbang Depdagri Republik Indonesia:

**Tabel 4. Kriteria Ketergantungan Keuangan Daerah**

Persentase PAD terhadap TPD	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat Rendah
10,01-20,00	Rendah
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup Tinggi
40,01-50,00	Tinggi
> 50,00	Sangat Tinggi

Sumber: Tim Litbang Depdagri (1991)

### Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Pengukuran tingkat efisiensi keuangan daerah dilakukan untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan mengukur input dan membandingkan dengan output yang dihasilkan. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula dengan sebaliknya. Berikut rumus untuk mengukur tingkat efisiensi keuangan daerah menurut (Mahmudi, 2016:141) sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

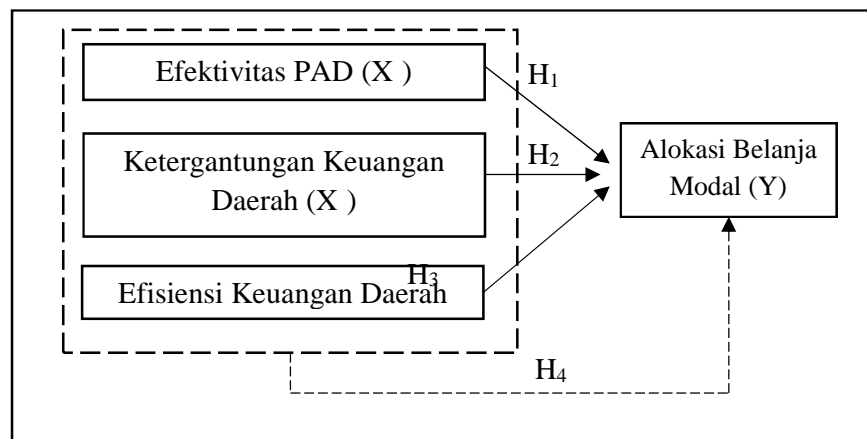
Kriteria untuk menetapkan efisiensi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 5. Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah**

Persentase Efisiensi (%)	Efisien Keuangan Daerah
> 100	Tidak Efisien
90-100	Kurang Efisien
80-90	Cukup Efisien
60-80	Efisien
< 60	Sangat Efisien

Sumber:(Wahyuddin & Sugianal, 2017:56)

### Kerangka Pemikiran



Sumber: Penulis (2023)

**Gambar 1. Paradigma Penelitian**

### Hipotesis

Menurut Mahmudi (2016:141), efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan berdasarkan potensi riil. Penelitian ini merujuk pada penelitian Indiyanti & Rahyuda (2018) dan Novita (2020). Pencapaian PAD yang nilainya melebihi anggaran, seharusnya bisa meningkatkan pengalokasian belanja modal, namun pemerintah daerah lebih banyak menggunakan pendapatan asli daerah tersebut untuk memenuhi belanja pegawai. Oleh karena itu, hipotesisnya adalah:

#### **H<sub>1</sub>: Efektivitas PAD berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.**

Rasio ketergantungan keuangan daerah menggambarkan tinggi rendahnya tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak eksternal, baik bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah lain. Berdasarkan penelitian

Marlina et al., (2017) ketergantungan keuangan daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Maka hipotesis dapat diusulkan sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>: Ketergantungan keuangan daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.**

Pengukuran tingkat efisiensi keuangan daerah dilakukan untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan output yang dihasilkan. Hipotesis dalam penelitian ini merujuk pada penelitian Andriyani (2020), Indiyanti & Rahyuda (2018) dan Martini & Dwirandra (2017). Hal ini karena jika efisiensi keuangan daerah semakin tinggi, maka belanja modal akan semakin menurun. Maka hipotesis dapat diusulkan sebagai berikut:

**H<sub>3</sub>: Efisiensi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.**

Efektivitas PAD, etergantungan keuangan daerah, dan efisiensi keuangan daerah, secara bersama-sama diduga memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal. Maka hipotesis dapat diusulkan sebagai berikut:

**H<sub>4</sub>: Efektivitas PAD, ketergantungan keuangan daerah, dan efisiensi keuangan daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.**

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan pendekatan hubungan kausal. Menurut (Sugiyono, 2018), “Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Provinsi Se-Sumatera yang terdiri dari 10 Provinsi. Teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan sampel jenuh. Sampel Jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2018). Sampel yang digunakan merupakan 10 Pemerintah Provinsi Se-Sumatera berupa data yang telah di audit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan



Republik Indonesia (BPK RI) yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan tahun anggaran 2017-2021.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu teknik dokumentasi dengan menggunakan data sekunder. Teknik dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila informasi yang dikumpulkan bersumber dari dokumen, seperti buku, jurnal, surat kabar, majalah, laporan kegiatan, notulen rapat, daftar nilai, kartu hasil studi, dan lain-lain (Kusumastuti et al., 2020).

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan bantuan *Software Eviews 12*. Persamaan analisis regresi data panel tersebut adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Keterangan:

- Y : Alokasi Belanja Modal
- $\alpha$  : Konstanta
- $\beta_1$  : Koefisien Regresi Efisiensi Keuangan Daerah
- X<sub>1</sub> : Efisiensi Keuangan Daerah
- $\beta_2$  : Koefisien Regresi Efektivitas PAD
- X<sub>2</sub> : Efektivitas PAD
- $\beta_3$  : Koefisien Regresi Ketergantungan Keuangan Daerah
- X<sub>3</sub> : Ketergantungan Keuangan Daerah
- $\epsilon$  : *Error*

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

Provinsi Se-Sumatera secara administratif terdiri dari 10 Provinsi. Provinsi tersebut diantaranya adalah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Bangka Belitung, dan Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan hasil pengumpulan data sekunder berupa laporan Pemerintah Provinsi Se-Sumatera Tahun 2017-2021, berikut hasil statistik deskriptif yang menjelaskan ringkasan data berupa nilai

rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum atas variabel-variabel penelitian.

**Tabel 6. Hasil *Common Effect Model***

	X1	X2	X3	Y
Mean	0.995160	0.626242	0.844760	0.185500
Median	1.009500	0.633000	0.840000	0.185500
Maximum	1.177000	0.837000	1.063000	0.273000
Minimum	0.727000	0.357000	0.684000	0.086000
Std. Dev.	0.090823	0.106607	0.094795	0.047800
Skewness	-0.448701	-0.361409	0.501880	-0.144138
Kurtosis	3.656911	3.955621	2.691273	2.192725
Jarque-Bera	2.576796	2.990994	2.297600	1.530824
Probability	0.275712	0.224137	0.317017	0.465142
Sum	49.75800	31.31210	42.23800	9.275000
Sum Sq. Dev.	0.404191	0.556892	0.440317	0.111957
Observations	50	50	50	50

*Sumber: Output data diolah (Eviews 12), 2023*

Berdasarkan tabel 6, diperoleh nilai rata-rata variabel belanja modal di Provinsi Se-Sumatera tahun 2017-2021 adalah sebesar 18.55 dengan nilai maximum adalah 27.32. Jika dilihat dari masing-masing Provinsi, rata-rata efektivitas PAD sebesar 99.51, ketergantungan keuangan daerah 62.62 dan efisiensi keuangan daerah memiliki nilai sebesar 84.47. Nilai maximum dan minimum untuk masing-masing variable independen diantaranya efektivitas PAD telah mencapai 117,67 dan minimum 72.71, ketergantungan keuangan daerah 83,68 dan 35.73 dan efisiensi keuangan daerah memiliki nilai sebesar 106.27 dan 68.38.

### **Hasil Analisis Regresi Berganda**

Analisis regresi linier berganda adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengukur pengaruh antara dua variabel atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Setelah dilakukan Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Langrange Multiplier maka diperoleh model estimasi yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini yaitu *Common Effect Model* dengan hasil regresi linear berganda sebagai berikut:

**Tabel 7. Hasil *Common Effect Model***

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.506871	0.124305	4.077641	0.0002
X1	-0.245866	0.083730	-2.936417	0.0052
X2	0.117316	0.062552	1.875510	0.0671
X3	-0.177759	0.077338	-2.298472	0.0261
Root MSE	0.042656	R-squared		0.187401
Mean dependent var	0.185500	Adjusted R-squared		0.134406
S.D. dependent var	0.047800	S.E. of regression		0.044472
Akaike info criterion	-3.311308	Sum squared resid		0.090976
Schwarz criterion	-3.158347	Log likelihood		86.78271
Hannan-Quinn criter.	-3.253060	F-statistic		3.536164
Durbin-Watson stat	0.930122	Prob(F-statistic)		0.021819

Sumber: Output data diolah (Eviews 12), 2023

Berdasarkan tabel 7, hasil regresi linear berganda dengan *Common Effect Model* diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 0,506871 - 0.245866X_1 + 0.117316X_2 - 0.177759X_3 + e$$

Dari hasil persamaan regresi linear diatas menunjukkan nilai konstanta yaitu sebesar 0,506871. Koefisien regresi efektivitas PAD adalah sebesar -0.245866 yang artinya berarti jika variabel independen (bebas) lain bernilai tetap dan variabel efektivitas PAD naik sebesar 1% maka pengalokasian belanja modal akan turun sebesar 0.245866. Nilai koefisien regresi variabel ketergantungan keuangan daerah bernilai 0.117316 berarti jika variabel independen (bebas) lain bernilai tetap dan variabel ketergantungan keuangan daerah naik sebesar 1% maka pengalokasian belanja modal akan naik sebesar 0.117316. Efisiensi keuangan daerah sebesar -0.177759 berarti jika variabel independen (bebas) lain bernilai tetap dan variabel efisiensi keuangan daerah naik sebesar 1% maka pengalokasian belanja modal akan menurun yaitu sebesar -0.177759.

#### **Koefisien Determinasi**

Hasil uji koefisien determinasi berdasarkan nilai *adjusted R-Squared* yaitu sebesar 0.134406. Hal tersebut berarti menunjukkan adanya kontribusi dari seluruh variabel independen diantaranya efektivitas PAD, ketergantungan keuangan daerah, dan efisiensi keuangan daerah dalam menjelaskan alokasi belanja modal sebesar 13,44% yang sisanya dijelaskan oleh variabel independent lain.

### Uji Parsial (Uji T)

Uji T dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara satu variabel independen dengan variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel dan melihat nilai signifikansi pada masing-masing variabel independen. Apabila t-hitung lebih besar daripada t-tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, begitupun sebaliknya.

1. Efektivitas PAD ( $X_1$ ) memiliki nilai t-hitung yaitu sebesar  $2.936417 > 2,05183$  dan nilai signifikansi sebesar  $0.0052 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_{a1}$  diterima. Artinya variabel Efektivitas PAD berpengaruh signifikan terhadap terhadap Alokasi Belanja Modal (Y).
2. Ketergantungan Keuangan Daerah ( $X_2$ ) memiliki nilai t-hitung  $1.875510 < 2,05183$  dan signifikansi sebesar  $0.0671 < 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_{a2}$  ditolak. Artinya variabel Ketergantungan Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap terhadap Alokasi Belanja Modal (Y).
3. Efisiensi Keuangan Daerah ( $X_3$ ) memiliki t-hitung sebesar  $2.298472 > 2,05183$  dan signifikansi sebesar  $0.0261 > 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_{a3}$  diterima. Artinya variabel Efisiensi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap terhadap Alokasi Belanja Modal (Y).

### Uji Simultan (Uji F)

Uji F merupakan pengujian yang dilakukan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel dan melihat nilai *prob* (*F-Statistic*). Apabila F-hitung  $>$  F-tabel dan nilai *prob* (*F-Statistic*)  $<$  0.05, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, begitupun sebaliknya. Berdasarkan hasil regresi, diketahui bahwa F-hitung  $>$  F tabel ( $3.535164 > 3.35$ ) dan *prob* (*F-Statistic*) sebesar  $0.021819 < 0,05$ . Dapat disimpulkan bahwa variabel efektivitas PAD, ketergantungan keuangan daerah, dan efisiensi keuangan daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.

## **Pembahasan**

### **1. Pengaruh Efektivitas PAD terhadap Alokasi Belanja Modal**

Berdasarkan uji parsial menunjukkan bahwa nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel ( $2.936417 > 2,05183$ ) dan nilai signifikansi efektivitas PAD lebih kecil dari 0,05 ( $0.0052 < 0,05$ ). Oleh karena itu,  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Secara statistik, dapat disimpulkan bahwa efektivitas PAD secara parsial berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Koefisien efektivitas PAD memiliki nilai negatif yang artinya menunjukkan hubungan yang berlawanan. Jika efektivitas PAD mengalami kenaikan sebesar 1% maka alokasi belanja modal akan mengalami penurunan sebesar -0.245866.

Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata rasio efektivitas PAD sebesar 99,51% yang dikategorikan cukup efektif. Artinya, Pemerintah Provinsi Se-Sumatera selama 2017-2021 dapat merealisasikan PAD sesuai dengan target yang diharapkan. Meskipun pemerintah daerah dianggap cukup mampu secara efektif dalam merealisasikan PAD, pencapaian ini belum sepenuhnya dapat berkontribusi dalam alokasi belanja modal. Faktanya Pemerintah Provinsi Se-Sumatera tidak memaksimalkan belanja untuk kepentingan publik yang menyebabkan alokasi belanja modal menjadi menurun.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Devi *et al.*, (2022) yang mengatakan bahwa efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Tetapi penelitian ini sesuai dengan penelitian (Novita & Nurhasanah, 2020) serta (Indiyanti & Rahyuda, 2018) yang menunjukkan bahwa efektivitas PAD berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal. Berdasarkan penelitian tersebut, kondisi ini disebabkan oleh kecenderungan diabaikannya pemenuhan kebutuhan masyarakat, sehingga pengalokasian belanja modal tidak terealisasikan secara maksimal.

### **2. Pengaruh Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal**

Berdasarkan uji parsial yang telah dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa t-hitung memiliki nilai sebesar 1.875510 yang artinya lebih kecil dari t-tabel ( $1.875510 < 2,05183$ ) dan nilai signifikansi ketergantungan keuangan daerah lebih besar dari 0,05 ( $0.0671 < 0,05$ ). Oleh karena itu,  $H_0$  diterima dan  $H_2$  ditolak. Secara statistik, dapat disimpulkan bahwa ketergantungan keuangan daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Rata-rata rasio ketergantungan Pemerintah Provinsi Se-Sumatera tahun 2017-2021 adalah sebesar 62,62% yang berarti termasuk kedalam kategori sangat tinggi. Hal ini berarti Kabupaten/Kota di Pemerintah Provinsi Se-Sumatera masih sangat mengandalkan sumber pendapatan transfer Pemerintah Pusat/Provinsi untuk membiayai belanja daerahnya. Rasio ketergantungan yang tinggi tidak mempengaruhi alokasi belanja modal yang ada di daerah. Hal ini bisa dilihat dari tingkat ketergantungan keuangan Provinsi Aceh pada tahun 2017 dengan rasio sebesar 83,7% (sangat tinggi), tetapi hal tersebut tidak diikuti dengan kenaikan/ penurunan alokasi belanja modal.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Marlina et al., 2017) mengemukakan bahwa ketergantungan keuangan daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Tetapi hasil penelitian mendukung penelitian yang dilakukan oleh Devi *et al.*, (2022) yang menyatakan bahwa ketergantungan keuangan daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel belanja modal. Artinya, setiap peningkatan atau penurunan alokasi belanja modal tidak dipengaruhi oleh ketergantungan keuangan daerah. Hal tersebut justru mempengaruhi ketergantungan yang berkelanjutan dari pemerintah daerah pada pemerintah pusat.

### **3. Pengaruh Efisiensi Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal**

Berdasarkan uji parsial menunjukkan bahwa nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel ( $2.298472 > 2,05183$ ) dan nilai signifikansi efisiensi keuangan daerah lebih kecil dari 0,05 ( $0.0261 < 0,05$ ). Oleh karena itu,  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima. Secara statistik, dapat disimpulkan bahwa efisiensi keuangan daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Koefisien efisiensi keuangan daerah memiliki nilai negatif yang artinya menunjukkan hubungan yang berlawanan. Jika efisiensi keuangan daerah mengalami kenaikan sebesar 1% maka alokasi belanja modal akan mengalami penurunan sebesar -0.177759.

Efisiensi keuangan daerah yang ada di Pemerintah Provinsi Se-Sumatera berkisar antara 60%-100%, artinya tingkat efisiensi keuangan daerah tidak menyentuh kriteria sangat efisien. Rasio ini memiliki rata-rata sebesar 84,47% yang termasuk dalam kriteria cukup efisien. Walaupun demikian, pemerintah belum sepenuhnya menganggap belanja modal sebagai hal yang penting bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tetapi lebih memilih mengalokasikan anggaran ke belanja lain seperti belanja operasi dan

pegawai. Hal ini bisa dilihat dalam tabel statistik deskriptif dimana nilai maksimum alokasi belanja modal lebih kecil dari 30% yaitu sebesar 27,3%.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriyani (2020) yang menunjukkan bahwa efisiensi keuangan daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap alokasi belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi. Hasil penelitian tersebut menyatakan adanya kecenderungan pemerintah daerah membelanjakan pendapatan ke pos belanja pegawai yang tidak memberikan dampak besar bagi kepentingan publik. Selanjutnya penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fajriati et al., 2022) yang menemukan bahwa efisiensi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

#### **4. Pengaruh Efektivitas PAD, Ketergantungan Keuangan Daerah, dan Efisiensi Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal**

Berdasarkan uji simultan menunjukkan bahwa nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel ( $3.535164 > 3.35$ ) dan *prob (F-Statistic)* sebesar  $0.021819 < 0,05$ . Oleh karena itu,  $H_0$  ditolak dan  $H_4$  diterima. F-hitung  $>$  F-tabel dan nilai *prob (F-Statistic)*  $<$  0.05, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_4$  diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel efektivitas PAD, ketergantungan keuangan daerah, dan efisiensi keuangan daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Efektivitas PAD berpengaruh signifikan terhadap terhadap alokasi belanja modal pada Pemerintah Provinsi Se-Sumatera. Ketergantungan keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal pada Pemerintah Provinsi Se-Sumatera. Efisiensi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap terhadap alokasi belanja modal pada Pemerintah Provinsi Se-Sumatera. Efektivitas PAD, ketergantungan keuangan daerah, dan efisiensi keuangan daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal pada Pemerintah Provinsi Se-Sumatera.

## **Saran**

Dari hasil penelitian yang sudah dipaparkan, maka penulis memiliki beberapa saran yaitu Pemerintah daerah diharapkan lebih meningkatkan efektivitas dalam menggali PAD dan lebih banyak mengalokasikan hasil pendapatan tersebut pada belanja modal atau belanja yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meminimalisir alokasi belanja rutin yang tidak perlu. Pemerintah daerah sebaiknya memaksimalkan upaya-upaya peningkatan pendapatan asli daerah dengan mencari potensi dan sumber daya daerah yang belum dimanfaatkan untuk dapat mengurangi ketergantungan daerah. Serta diharapkan mampu mengefisiensikan pengeluaran untuk mengalokasikan pengeluaran daerah ke belanja yang dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat.

Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti permasalahan alokasi belanja modal maka dapat menambahkan variabel-variabel independen lain sehingga kedepannya diharapkan mampu menjelaskan secara teoritis mengenai alokasi belanja modal lebih baik lagi dari penelitian ini. Selain menambahkan variabel, peneliti dapat juga menambahkan tahun penelitian yang akan diuji untuk memperoleh hasil yang lebih akurat.



## DAFTAR REFERENSI

- Andriyani, N., Mukhzarudfa, & PA, E. D. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2014-2018). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi*, 5(2), 132–144. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jaku.v5i2.10263>
- Devi, A. S., Masnila, N., & Nurhasanah. (2022). Pengaruh Kinerja keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Syntax Idea*, 4(6), 971–989.
- Fajriati, C. E., Engkus, & Anwar, H. S. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011-2020. *Jurnal MODERAT*, 8(3), 436–451. <https://doi.org/https://doi.org/10.25157/moderat.v8i3.2709>
- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Indiyanti, N. M. D., & Rahyuda, H. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 7(9), 4713–4746. <https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2018.v7.i09.p4>
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.
- Maria, E., & Halim, A. (2021). E-Government dan Korupsi: Studi di Pemerintah Daerah Indonesia dari Perspektif Teori Keagenan. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 5(1), 40–58. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2021.v5.i1.4789>
- Marlina, L., Indriani, M., & Fahlevi, H. (2017). Kinerja Keuangan dan Alokasi Belanja Modal (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh). *Jurnal Administrasi Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 6(1), 21–30.
- Martini, K., & Dwirandra, A. A. N. B. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Novita, I., & Nurhasanah, N. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi pada pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Se-Jawa Barat Periode Tahun Anggaran 2012-2017). *Jurnal Buana Ilmu*, 4(2), 64–77. <https://doi.org/https://doi.org/10.36805/bi.v4i2.1050>
- Nurhidayati, L. L., & Yaya, R. (2013). Alokasi Belanja Modal untuk Pelayanan Publik: Praktik di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 17(2), 102–114. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/jaai.vol17.iss2.art2>
- Putri, R. S., & Rahayu, S. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat (Studi Empiris pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2017). *Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi*, 3(2), 256–268.
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD, (2014).
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.

- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suwandi, K. A., & Tahar, A. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota D.I. Yogyakarta). *Jurnal InFestasi*, 11(2), 118–136. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/infestasi.v11i2.1127>